PAPER FILOSOFIS-POLITIK

What Is Fundamental State To Statement Truth?

The Core Rupture: Between Auctoritas and Truth

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.
Peneliti Independen — Bandar Lampung, Indonesia
2025

ABSTRAK

Paper ini mengajukan pertanyaan mendasar tentang kondisi kemungkinan legitimasi negara: dari mana otoritas berbicara mendapatkan haknya untuk dianggap benar? Dua kemungkinan jawaban diidentifikasi — voted truth sebagai kebenaran prosedural dan statement truth sebagai kebenaran fundamental — dan keduanya dinyatakan tidak kompatibel. Melalui lensa Frantz Fanon, Aime Cesaire, dan Homi Bhabha, paper ini mendiagnosis Indonesia sebagai republik tanpa res publica yang sesungguhnya: negara yang terbentuk sebagai reprivata, di mana struktur publik diisi oleh kepentingan privat dengan mekanisme kolonial yang berganti tangan bukan hilang. Mekanisme sosial kolonial yang terinternalisasi — di level struktural, diskursif, dan psikis — diidentifikasi sebagai penghalang fundamental bagi terbentuknya statement truth. Paper ini menyimpulkan dengan tiga syarat yang belum pernah diselesaikan Indonesia secara bersamaan: kejujuran filosofis tentang fundamen, pembongkaran mekanisme kolonial internal, dan rekognisi bahwa fatrah yang berlangsung adalah krisis epistemis, bukan sekadar krisis institusional.

Kata Kunci: *voted truth, statement truth, auctoritas sine iure, res publica, reprivata, mekanisme sosial kolonial, episteme postkolonial, fatrah epistemis*

I. THE FUNDAMENTAL QUESTION

PERTANYAAN	What is fundamental state to statement truth? — Pertanyaan ini bukan tentang hukum tata negara. Ia adalah pertanyaan tentang kondisi kemungkinan legitimasi itu sendiri.

Sebelum sebuah negara dapat berbicara tentang konstitusi, hak, atau kebijakan — pertanyaan yang lebih dalam harus dijawab: dari mana otoritas berbicara mendapatkan haknya untuk dianggap benar?

Ada dua jawaban yang mungkin, dan keduanya tidak kompatibel.

Tipe Kebenaran	Definisi	Fundamen	Kelemahan Struktural
Voted Truth	Kebenaran sebagai hasil prosedur — mayoritas, konsensus, diplomasi	Prosedural	Auctoritas sine iure: ketika prosedur digugat, seluruh bangunan bergetar karena tidak ada yang di bawahnya
Statement Truth	Kebenaran sebagai fundamen yang mendahului dan melampaui prosedur	Ontologis	Pertanyaan tak terhindarkan: siapa yang memiliki akses ke fundamen itu, dan bagaimana akses itu diverifikasi?

Voted truth menghasilkan auctoritas sine iure — kewenangan yang berdiri di atas pasir proseduralnya sendiri. Ia tidak memiliki sesuatu di bawahnya yang tidak bisa digugat, karena seluruh legitimasinya adalah prosedural. Statement truth menghadapi masalah akses: siapa yang berwenang menyatakan bahwa ia berhubungan langsung dengan fundamen?

Indonesia — dan hampir semua negara pasca-kolonial — terperangkap tepat di antara dua jawaban ini, tanpa pernah benar-benar memilih salah satu secara jujur.

1.1 Elaborasi: Mengapa Keduanya Tidak Kompatibel

Voted truth dan statement truth bukan hanya dua strategi berbeda untuk mencapai legitimasi yang sama. Mereka adalah dua ontologi yang berbeda tentang apa artinya 'benar' dalam konteks kekuasaan publik.

Voted truth beroperasi dalam logika relasional: sesuatu benar karena diakui oleh sebagian besar subjek dalam sistem. Kebenaran adalah fungsi dari konsensus, dan konsensus adalah fungsi dari prosedur. Ini berarti kebenaran secara prinsip bisa berubah jika prosedur berubah — ia tidak memiliki stabilitas ontologis.

Statement truth beroperasi dalam logika substansial: sesuatu benar karena ia terhubung dengan sesuatu yang tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Konsensus bisa mengakuinya atau tidak — tapi itu tidak mengubah statusnya sebagai benar. Masalahnya adalah bahwa klaim ini selalu bisa dipertanyakan: siapa yang memutuskan bahwa koneksi ke fundamen itu valid?

PARA DOKS	*Setiap klaim atas statement truth yang dipaksakan melalui prosedur institusional pada akhirnya bergantung pada voted truth untuk diakui. Dan setiap voted truth yang membutuhkan legitimasi lebih dalam dari sekadar prosedur, secara diam-diam mengklaim statement truth. Keduanya membutuhkan satu sama lain — dan itulah yang membuat tegangan ini tidak bisa diselesaikan dengan memilih salah satunya.*

II. REPUBLIK TANPA RES PUBLICA — REPRIVATA

Kata republik berasal dari res publica — urusan publik, milik bersama, yang tidak dapat diprivatisasi. Ini adalah janji ontologis dari bentuk negara itu sendiri: bahwa ada sesuatu yang bukan milik siapapun secara privat karena ia milik semua.

Indonesia mendeklarasikan republik. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa res publica tidak pernah benar-benar terbentuk. Yang terbentuk adalah reprivata: struktur publik yang diisi oleh kepentingan privat, dengan mekanisme kolonial yang tidak hilang melainkan berganti tangan.

2.1 Fanon: Borjuasi Nasional sebagai Kontinuasi Struktural

Fanon melihatnya paling keras: revolusi kemerdekaan yang tidak menyelesaikan dirinya sendiri akan melahirkan borjuasi nasional yang hanya menggantikan posisi kolonizer tanpa mengubah strukturnya. Elite baru belajar bahasa kemerdekaan, mengenakan simbol

republik, tetapi mengoperasikan logika yang sama — akumulasi, eksklusi, hierarki — karena itulah satu-satunya logika yang mereka warisi dan kuasai.

Republik menjadi kostum, bukan kondisi. Ini bukan kegagalan individu, melainkan kegagalan struktural: ketika satu-satunya template yang tersedia adalah template kolonial, maka kemerdekaan hanya mengubah siapa yang mengoperasikan template tersebut, bukan template itu sendiri.

FANON	Kemerdekaan yang tidak mendekonstruksi logika kolonial hanya menghasilkan kolonialisme dengan wajah baru. Borjuasi nasional menjadi kolonizer internal yang lebih efisien karena ia memahami bahasa dan konteks yang dijajahnya.

2.2 Cesaire: Episteme Kolonial sebagai Warisan Tak Terlihat

Cesaire menambahkan dimensi yang lebih dalam: kolonialisme tidak hanya merusak yang dijajah, ia juga merusak si penjajah dan seluruh peradaban yang mengklaim membenarkannya. Ketika Indonesia merdeka, ia tidak hanya mewarisi kerusakan struktural — ia juga mewarisi cara berpikir yang telah dibentuk oleh 350 tahun belajar bahwa hierarki adalah alamiah, bahwa pusat lebih bernilai dari pinggiran, bahwa modernitas Barat adalah standar validasi.

Ini bukan trauma yang hilang dengan proklamasi — ia adalah episteme yang menjadi invisible karena sudah terlalu dalam tertanam. Episteme tidak terasa seperti pilihan; ia terasa seperti realitas. Dan realitas yang tidak dipertanyakan adalah yang paling kuat.

CESAIRE	Yang paling berbahaya dari warisan kolonial bukan institusinya yang terlihat, melainkan cara berpikirnya yang tidak terlihat karena sudah menjadi invisible default dari seluruh sistem.

2.3 Bhabha: Mimicry, Hybridity, dan Kondisi 'Almost But Not Quite'

Bhabha masuk dengan konsep yang paling halus: mimicry dan hybridity. Subjek kolonial dipaksa meniru kolonizer — belajar bahasanya, mengadopsi institusinya, meniru cara berpikirnya — tetapi tidak pernah diizinkan menjadi kolonizer sepenuhnya. Hasilnya adalah kondisi 'almost but not quite': selalu cukup mirip untuk diterima, tetapi selalu cukup berbeda untuk tetap subordinat.

Dalam konteks Indonesia: Pancasila sendiri adalah produk mimicry dalam arti tertentu — ia mencoba membangun statement truth dengan bahasa dan struktur yang dipinjam dari tradisi konstitusionalisme Barat sambil mengisi kontennya dengan nilai lokal dan religius yang tidak pernah sepenuhnya kompatibel dengan kerangka yang dipinjam itu. Hasilnya adalah hybrid — bukan dalam arti negatif, tetapi dalam arti Bhabha: sesuatu yang tidak sepenuhnya menjadi apa yang ia cita-citakan, dan justru dalam ketidaklengkapan itulah ia eksis.

```
Struktur Reprivata (diagrama relasi):

  Janji Res Publica       →  milik semua, tidak dapat diprivatisasi
  Realitas Reprivata      →  struktur publik diisi kepentingan privat
  Mekanisme Peralihan     →  kolonialisme berganti tangan, tidak hilang
  Episteme Invisible      →  cara berpikir hierarki tertanam sebagai
'realitas'
  Produk Mimicry          →  hybrid yang 'almost but not quite'
```

III. MEKANISME SOSIAL SEBAGAI KATEGORI ANALITIS

Yang membuat tiga pemikir ini relevan bukan hanya sebagai kritik historis tetapi sebagai alat analitis kontemporer adalah bahwa mereka semua menolak memposisikan kolonialisme sebagai peristiwa eksternal yang selesai. Bagi ketiganya, kolonialisme adalah mekanisme sosial — sebuah cara mengorganisasi relasi kekuasaan, distribusi nilai, dan produksi kebenaran yang terus bekerja bahkan setelah institusi kolonialnya secara formal dibubarkan.

3.1 Tiga Level Mekanisme

Mekanisme ini bekerja di tiga level sekaligus:

Level	Cara Kerja	Manifestasi dalam Konteks Indonesia
Struktural	Melalui institusi yang mewarisi logika hierarki kolonial	Birokrasi, sistem pendidikan, struktur penguasaan sumber daya yang mereproduksi hierarki lama dengan nama baru
Diskursif	Melalui cara kebenaran diproduksi dan divalidasi	Apa yang dianggap 'ilmiah,' 'modern,' 'sah' vs 'tradisional,' 'primitif,' 'tidak relevan'

Psikis	Melalui internalisasi subordinasi oleh subjek yang dijajah	Ketika hierarki yang menempatkan seseorang di bawah mulai terasa alamiah, bukan konstruksi

3.2 Mengapa Voted Truth Melindungi Status Quo

Ketika negara berdiri di atas auctoritas sine iure — kewenangan dari prosedur tanpa fundamen kebenaran — ia tidak memiliki kapasitas untuk membongkar mekanisme ini. Karena membongkar mekanisme kolonial internal justru akan mengguncang struktur yang memberikan otoritas kepada mereka yang sedang berkuasa.

Voted truth secara struktural melindungi status quo karena mereka yang mendefinisikan prosedur adalah mereka yang sudah menang dalam prosedur sebelumnya. Ini adalah sirkularitas yang tidak dapat diselesaikan dari dalam: untuk mengubah prosedur, Anda butuh kemenangan dalam prosedur; tapi prosedur yang ada dirancang untuk memenangkan yang sudah menang.

SIRKULARITAS STRUKTURAL	*Voted truth adalah self-sealing system: mereka yang menang mendefinisikan prosedur, prosedur menghasilkan kemenangan mereka, dan kemenangan memvalidasi prosedur. Untuk keluar dari lingkaran ini dibutuhkan sesuatu yang berada di luar sistem — yaitu statement truth yang tidak bergantung pada prosedur untuk validitasnya.*

3.3 Elaborasi: Episteme sebagai Pasal 0 dari Mekanisme Kolonial

Yang paling sulit dibongkar dari mekanisme kolonial adalah levelnya yang paling dalam — level psikis-epistemik. Ini adalah apa yang dapat kita sebut sebagai Pasal 0 dari sistem kolonial yang terinternalisasi: aksioma tak tertulis yang menjadi kondisi kemungkinan dari seluruh hierarki yang dibangun di atasnya.

Pasal 0 kolonial berbunyi kurang lebih: 'hierarki ini alamiah, validasi ini standar, modernitas ini universal.' Ia tidak perlu ditulis karena sudah tertanam sebagai episteme — cara berpikir yang tidak lagi terasa sebagai pilihan, melainkan sebagai realitas yang sudah ada sebelum pertanyaan diajukan.

Selama Pasal 0 ini tidak diidentifikasi dan dihadapi secara eksplisit, reformasi institusional apapun akan beroperasi di atas fondasi yang sama. Fasadnya berubah; operating system-nya tidak.

IV. FUNDAMENTAL STATE TO STATEMENT TRUTH: KONDISI KEMUNGKINANNYA

Pertanyaan awal akhirnya mengarah ke sini: apa yang dibutuhkan agar sebuah negara benar-benar berdiri di atas statement truth bukan sekadar voted truth?

Jawabannya bukan hanya reformasi institusional. Ia membutuhkan setidaknya tiga hal yang belum pernah benar-benar diselesaikan Indonesia secara bersamaan.

4.1 Syarat Pertama: Kejujuran Filosofis tentang Fundamen

Bukan mempertahankan kekaburan Pancasila sebagai kompromi nyaman, melainkan benar-benar menghadapi pertanyaan: dari mana kebenaran yang mendasari negara ini berasal?

Kekaburan yang disengaja — ambiguitas yang dipelihara agar semua pihak bisa mengklaim Pancasila tanpa konflik — adalah bentuk penghindaran yang memiliki biaya epistemik. Ia mencegah pertanyaan tentang fundamen pernah benar-benar dijawab, dan dengan demikian mencegah negara pernah benar-benar berdiri di atas sesuatu yang lebih dalam dari konsensus prosedural.

SYARAT I	Kejujuran filosofis tentang fundamen: menghadapi pertanyaan tentang dari mana kebenaran negara bersumber, bukan memelihara kekaburan yang membuat pertanyaan itu tidak perlu dijawab.

4.2 Syarat Kedua: Pembongkaran Mekanisme Kolonial Terinternalisasi

Bukan sebagai proyek identitas, melainkan sebagai syarat bahwa res publica benar-benar menjadi milik publik bukan reprivata.

Pembongkaran ini harus beroperasi di ketiga level: struktural (redesain institusi yang mereproduksi hierarki kolonial), diskursif (rekonseptualisasi tentang apa yang dianggap valid sebagai pengetahuan dan kebenaran), dan psikis (mengidentifikasi Pasal 0 kolonial yang tertanam sebagai episteme dan menghadapinya secara eksplisit).

SYAR AT II	Pembongkaran mekanisme kolonial terinternalisasi di tiga level sekaligus — struktural, diskursif, dan psikis-epistemik. Tidak dapat diselesaikan hanya di satu level; ketiganya saling menopang.

4.3 Syarat Ketiga: Rekognisi Fatrah sebagai Krisis Epistemis

Fatrah yang sedang berlangsung bukan hanya krisis institusional melainkan krisis epistemis — krisis tentang dari mana kebenaran berbicara, dan apakah negara ini memiliki keberanian untuk menghadapi pertanyaan itu secara terbuka.

Krisis institusional dapat ditangani dengan reformasi prosedural. Krisis epistemis tidak — karena ia berada di level yang lebih dalam dari prosedur mana pun. Ia membutuhkan keberanian untuk mengakui bahwa sistem yang sedang berjalan tidak memiliki fundamen yang memadai, dan bahwa pembangunan fundamen itu berarti membongkar sebagian dari apa yang sudah dibangun di atasnya.

SYAR AT III	*Rekognisi bahwa yang sedang terjadi adalah krisis epistemis — krisis tentang dari mana kebenaran berbicara — bukan sekadar krisis institusional yang bisa diselesaikan dengan reformasi prosedural.*

```
Kondisi Kemungkinan Statement Truth:

  [1] Kejujuran filosofis tentang fundamen
       → menghadapi 'dari mana kebenaran negara bersumber?'

  [2] Pembongkaran mekanisme kolonial terinternalisasi
       → di level struktural + diskursif + psikis-epistemik

  [3] Rekognisi fatrah sebagai krisis epistemis
       → bukan krisis prosedural yang bisa diselesaikan dengan reformasi
```

```
Ketiga syarat ini harus diselesaikan bersamaan —
menyelesaikan satu atau dua tanpa yang ketiga tidak memadai.
```

V. SINTESIS: AUCTORITAS SINE IURE DAN LOGIKA PASAL 0

Analisis yang dibangun dalam paper ini memiliki resonansi struktural yang dalam dengan kerangka yang dapat disebut sebagai logika Pasal 0: prinsip tak tertulis yang menjadi kondisi kemungkinan dari seluruh sistem formal yang dibangun di atasnya.

5.1 Auctoritas Sine Iure sebagai Pasal 0 yang Salah

Ketika negara beroperasi di atas auctoritas sine iure — kewenangan tanpa iure, tanpa hak yang berasal dari sesuatu yang lebih dalam dari prosedur — ia sesungguhnya memiliki Pasal 0 yang bermasalah. Pasal 0-nya berbunyi: 'prosedur adalah fundamen.' Tapi prosedur adalah proses, bukan fundamen. Proses tidak bisa menjadi dasarnya sendiri.

Ini adalah versi institusional dari paradoks yang sama dengan Pasal 1 dan 2 dalam contoh akademik: sistem yang membuat dirinya sendiri tidak bisa digugat justru karena ia tidak memiliki sesuatu di bawahnya yang membuatnya layak tidak digugat.

5.2 Statement Truth sebagai Syarat Pasal 0 yang Valid

Untuk sebuah negara dapat berdiri di atas statement truth, ia membutuhkan Pasal 0 yang valid — prinsip yang mendahului dan tidak bergantung pada prosedur untuk legitimasinya. Tetapi 'valid' di sini bukan berarti 'mutlak dan tidak dapat dipertanyakan.' Ia berarti: transparan, dapat diidentifikasi, dapat dikritisi, dan dapat dipertahankan dengan argumen yang tidak sirkular.

Pasal 0 yang valid bukan yang tidak pernah dipertanyakan, melainkan yang dapat bertahan ketika dipertanyakan. Kekuatannya bukan dari immunitas terhadap kritik, melainkan dari kapasitasnya untuk merespons kritik tanpa runtuh.

DISTINGSI KRITIS	Perbedaan antara voted truth dan statement truth pada akhirnya adalah perbedaan antara Pasal 0 yang tersembunyi (dan karenanya tidak dapat dikritisi) dengan Pasal 0 yang transparan (dan karenanya dapat dipertahankan). Keduanya memiliki Pasal 0 — pertanyaannya adalah apakah ia diakui atau disembunyikan.

5.3 Implikasi untuk Diagnosis Indonesia

Indonesia tidak kekurangan narasi tentang fundamen — Pancasila adalah upaya yang serius dan substansial untuk membangun statement truth yang melampaui prosedur. Masalahnya bukan pada konten Pancasila, melainkan pada cara ia dioperasikan: sebagai simbol yang harus dilindungi dari pertanyaan, bukan sebagai fundamen yang cukup kuat untuk menjawab pertanyaan.

Ketika sebuah prinsip tidak dapat dipertanyakan bukan karena ia kuat melainkan karena mempertanyakannya dianggap berbahaya, ia telah berubah dari statement truth menjadi voted truth yang disakralkan — prosedur yang mendeklarasikan dirinya sebagai fundamen tanpa benar-benar menjadi fundamen.

Selama ia belum, klaim kepastian dan keabsolutan negara tetap akan menjadi apa yang dirumuskan: auctoritas sine iure — kewenangan yang berbicara keras justru karena ia tidak yakin dengan dasarnya sendiri.

VI. KESIMPULAN

Paper ini telah membangun argumen yang bergerak dari pertanyaan epistemologis murni ke diagnosis postkolonial dan berakhir pada kondisi kemungkinan yang belum terpenuhi. Proposisi-proposisi sentral yang menopang argumen ini dapat dirangkum sebagai berikut:

1	Voted truth dan statement truth adalah dua ontologi yang tidak kompatibel tentang apa artinya 'benar' dalam konteks kekuasaan publik.

2	Indonesia terperangkap di antara keduanya tanpa pernah memilih salah satu secara jujur — menghasilkan auctoritas sine iure yang struktural.
3	Res publica tidak pernah terbentuk; yang terbentuk adalah reprivata, dengan mekanisme kolonial yang berganti tangan bukan hilang.
4	Mekanisme kolonial bekerja di tiga level: struktural, diskursif, dan psikis — dan level psikis-epistemik adalah yang paling sulit dibongkar.
5	Voted truth secara struktural melindungi status quo karena mereka yang mendefinisikan prosedur adalah mereka yang sudah menang dalam prosedur sebelumnya.
6	Kondisi kemungkinan statement truth membutuhkan tiga syarat yang diselesaikan bersamaan: kejujuran filosofis, pembongkaran mekanisme kolonial, dan rekognisi fatrah sebagai krisis epistemis.
7	Pasal 0 dari setiap sistem kekuasaan — prinsip tak tertulis yang menjadi fondasi seluruh klaim legitimasi — menentukan apakah kewenangan itu benar-benar berakar atau hanya berbicara keras karena tidak yakin dengan dasarnya sendiri.

Selama tiga syarat itu belum diselesaikan secara bersamaan, klaim kepastian dan keabsolutan negara tetap akan menjadi auctoritas sine iure — kewenangan yang berbicara keras justru karena ia tidak yakin dengan dasarnya sendiri.

REFERENSI KONSEPTUAL

Paper ini bersifat argumentatif-filosofis dan beroperasi dalam tradisi filsafat politik kritis. Kerangka konseptualnya bertumpu pada:

- Frantz Fanon — The Wretched of the Earth (1961): analisis tentang bagaimana borjuasi nasional menggantikan posisi kolonizer tanpa mengubah strukturnya.
- Aime Cesaire — Discourse on Colonialism (1950): kolonialisme sebagai kerusakan episteme yang melampaui institusi dan bertahan melalui cara berpikir yang terinternalisasi.
- Homi Bhabha — The Location of Culture (1994): mimicry, hybridity, dan kondisi 'almost but not quite' sebagai karakteristik identitas postkolonial.
- Tradisi filsafat politik tentang legitimasi: distingsi antara kewenangan prosedural (auctoritas) dan kebenaran substantif (iure) dalam teori negara.

— Kerangka Pasal 0 — dikembangkan dalam seri paper ini: prinsip tak tertulis sebagai kondisi kemungkinan dari seluruh sistem formal yang dibangun di atasnya.

Ahmad Wansa Al-faiz, S.I.P.
Bandar Lampung, Indonesia — 2025